

**SISTEM KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA
DALAM KONTEKS PERGANTIAN KEKUASAAN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

BUDI HARIANTO

15370008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Saudi Arabia adalah negara berbentuk kerajaan atau monarki absolut. Selain itu Saudi Arabia juga dikenal sebagai negara Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an sebagai konstitusinya. Sebagai negara kerajaan kekuasaan dipegang penuh oleh raja. Hampir seluruh aspek pemerintahan ada dibawah kendali raja semua keputusan harus sampai kepada raja terlebih dahulu. Karena sebagai negara kerajaan atau monarki absolut pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun sejauh ini posisi raja masih berada kepada generasi kedua setelah Raja Abdullaziz sebagai raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Saudi Arabia setelah itu di gantikan oleh anak-anaknya sebagai generasi kedua penerus takhta raja Saudi Arabia.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *liberary research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari an-Nizham al-Asasi lil Hukmi Tahun 1412 H/1992 M. serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian skripsi ini terdapat tiga fokus permasalahan yang diangkat untuk dikaji, yakni bagaimana sistem ketatanegaraan Saudi Arabia dalam konteks pergantian kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipegang penuh oleh raja, kedua bagaimana implementasi siyasah dusturiyah dalam suksesi kekuasaan di Saudi Arabia, dan yang ketiga bagaimana komparasi suksesi kekuasaan Saudi Arabia dengan negara-negara muslim dan beberapa negara monarki di dunia dalam takaran pendekatan ayat-ayat siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan raja yang akan digantikan oleh pangeran setelah diangkat menjadi putra mahkota mengalami perjalanan yang bisa dibilang demokratis yang penunjukkan putra mahkota tidak lagi ditunjuk oleh raja semenjak adanya putusan yang di keluarkan oleh Raja Abdullah pada tahun 2006. Penunjukkan putera mahkota dilakukan oleh dewan kepatuhan yang beranggotakan 34 dari petinggi keluarga kerajaan walaupun raja tidak memiliki kewenangan lagi untuk menunjukkan putera mahkota untuk menjadi penerus takhta selanjutnya tapi raja masih memiliki wewenang untuk memilih menominasi pangeran-pangeran yang akan dimusyawarahkan oleh dewan kepatuhan. Setelah dimusyawarahkan

oleh dewan kepatuhan siapa yang akan menjadi putera mahkota Raja akan mengumumkan siapa yang akan menjadi putera mahkota kepada keluarga kerajaan, rakyat dan awak media. Putera mahkota akan diangkat menjadi raja apabila raja telah wafat dan sesuai diatur dalam pasal 5 an-Nizham al-Asasi lil Hukmi Tahun 1412 H/1992 M.

Kata Kunci : Saudi Arabia, Pergantian Kekuasaan, *an-Nizham al-Asasi lil Hukmi, Siyash Dusturiyah*



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Harianto
NIM : 15370008
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Budi Harianto
NIM: 15370008



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Budi Harianto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budi Harianto

NIM : 15370008

Judul : *“SISTEM KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA DALAM KONTEKS PERGANTIAN KEKUASAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori., M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-488/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia Dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUDI HARIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 15370008
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

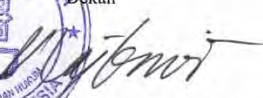

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 09 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Allah sedang tersenyum kepadamu

JANGAN KETIDAKSUKAANMU KEPADA SESEORANG DAN
SEKELOMPOK ORANG MEMBUATMU TIDAK BERLAKU ADIL

~ANIES BASWEDAN~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

**Kedua orang tua saya tersayang
Ketiga kakak yang sangat saya cintai
Keluarga Besar Alumni MAN Rantau Prapat Yogyakarta
Dan Kepada Saudara saya Achmad Kurniawan, S.H.
Almamaterku tercinta, Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

تَعْدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جيزة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta* "Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta* "Marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

صَلَاتُ الْفَيْضِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> أَجِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya"mati</i> تَسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya"Mat</i> كِرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُود	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> +ya'' <i>mati</i> بَيْنَ	Ditulis	<i>Ai</i>
2	<i>fathah</i> +wawu <i>mati</i> قَوْه	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,)

1	أَكْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَايْنَشَاكْرَتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

قُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
أَيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

سَامَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
سَامِئَةَ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أُوَاحِيسٌ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʿan, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله • اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Amiin.

Skripsi dengan judul “**SISTEM KETATANEGARAAN SAUDI ARABIA DALAM KONTEKS PERGANTIAN KEKUASAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**” ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan kepada penulis.
5. Dr. Ahmad Yani Anshori., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritikan dan saran, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Ibu Hj. Suratiningih, S.Sos., selaku Tata Usaha Jurusan yang telah membantu dan mempermudah pengurusan skripsi dari awal hingga selesai, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
8. Kedua orang tuaku, Hj. Subandia dan Joko serta ketiga kakak saya yang telah memberikan do'a, cinta, kasih sayang, nasehat, dan segalanya untuk penyusun.
9. Sahabat Kodongs, Achmad Kurniawan, S.H., Moh. Hamzah Hizbulloh, S.H., Farhad Najib Izzudin, S.H., Althof Dinantama, S.H., Ang Rijal Amin, S.H., Muhammad Furqon, S.H., Muhammad Saiful Bahri, S.H., Fuad Abdul Aziz, S.H., Muflikhatul Amalia, S.H., Dina Nashiha Putri Akhirani, S.H., Tika Agustina, S.H., Fadhilah Nur Rohmah, S.H. terima kasih kehadiran kalian membuat masa-masa perkuliahanku penuh petualangan yang sangat dramatik.

10. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berika kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin ya rabbal ,,aalamin.*

Yogyakarta, 25 Juli 2019
Penyusun,

Budi Harianto
NIM: 15370008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II SIYASAH DUSTURIYAH DAN SUKSESI	
KEKUASAAN	13
A. Siyasah Dusturiyah.....	13
1. Pengertian	13
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	15
3. Pengertian Ahl al-Hall Wa al-Aqd'	16
B. Sukses Kekuasaan.....	25
1. Masa Khulafaur Rasyidin	25
a. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar Al Shiddiq.....	28
b. Pengangkatan Khalifah Umar ibn Khattab.....	28
c. Pengangkatan Khalifah Utsman ibn Affan.....	29
d. Pengangkatan Khalifah Ali Ibn Abi Thalib.....	29

2. Masa Dinasti-Dinasti	30
a. Dinasti Umayyah.....	30
b. Dinasti Abbasiyah	32
c. Dinasti Turki Utsmani.....	33
3. Suksesi Kekuasaan di Negara Muslim.....	34
a. Mesir.....	34
b. Syria	35
c. Yordania	35
d. Republik Palestina.....	35
4. Suksesi Kekuasaan di Beberapa Negara Monarki di Dunia	34
a. Belanda.....	36
b. Jepang	39
c. Inggris	43
BAB III SEKILAS TENTANG SAUDI ARABIA	48
A. Arab Saudi	48
B. Sejarah Kerajaan Saudi Arabia.....	50
C. Bentuk Pemerintahan Saudi Arabia.....	52
D. Bentuk Konstitusi	53
E. Monarki dan Keluarga Kerajaan.....	54
F. Raja-Raja Yang Pernah Memerintah	55
G. Keluarga dan Penerus	58
BAB IV PERGANTIAN KEKUASAAN DALAM KETATA- NEGARAAN SAUDI ARABIA.....	63
A. Ketatanegaraan Saudi Arabia	63
1. Konstitusi Saudi Arabia	63
2. Pergantian Kekuasaan	69
a. Penggantian 3 Putra Mahkota	72
b. Ayah ke Anak.....	73
B. Implementasi Siyasa Dusturiyah Dalam Pergantian Kekuasaan.....	74

C. Komparasi Suksesi Kekuasaan Saudi Arabia Dengan Negara-negara Muslim	76
1. Mesir	76
2. Syria	76
3. Yordania	76
4. Republik Palestina	77
D. Suksesi Kekuasaan di Beberapa Negara Monarki di Dunia ...	77
1. Belanda	77
2. Inggris	78
3. Jepang	78
 BAB V PENUTUP	 79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	 82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	I
KONSTITUSI ARAB SAUDI	III
CURRICULUM VITAE	XXXIX



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Perbandingan Sistem Monarki Saudi Arabia dan Belanda	38
Tabel 0.2	Perbedaan sistem monarki Saudi Arabia dan Jepang	42
Tabel 0.3	Permaisuri dan Anak-anak Abdullaziz	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bendera Arab Saudi	48
Gambar 1.2	Peta Arab Saudi.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh sekumpulan orang-orang yang hidup diwilayah tertentu dengan tujuan sama yang terkait dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri.¹ Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan warganya untuk memperoleh kehidupan dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara di dunia masing-masing mempunyai sistem sendiri untuk menjalankan rodah pemerintahannya.²

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan. Sedangkan secara yuridis jika negara dilihat dari isinya atau strukturnya.

Saudi Arabia adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan. Selain itu Saudi Arabia juga dikenal sebagai negara Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an sebagai konstitusinya. Walaupun Saudi Arabia merupakan negara Islam, Saudi Arabia tidak menggunakan

¹ Abdulkarim, Aim dan Trisna Sukmayadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung : Grafindo, 2011), hlm. 6.

² Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H., *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm. 23.

sistem Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Saudi Arabia adalah sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Seperti negara Inggris yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian, begitu juga dengan Saudi Arabia yang menjalankan sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian yang diputuskan berdasarkan kondisi negara itu sendiri.

Saudi Arabia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami perpindahan kekuasaan politik, khususnya Hijaz sebagai negeri kelahiran Islam. Diantara kekuasaan yang pernah lahir di Saudi Arabia adalah kekuasaan al-Khulafa al-Rasyidin, Bani Abbasiyah dll. Yang telah membawa kebangkitan peradaban Islam. Saudi Arabia pernah mengalami beberapa fase pemerintahan yang mana itu membawa pembelajaran bagi Saudi Arabia untuk mengembangkan wawasan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam bernegara.³

Sebagai negara monarki absolut atau kerajaan Saudi Arabia merupakan yang berdiri di daerah kawasan Timur Tengah. Bentuk monarki absolut menjadikan Saudi Arabia sebagai negara yang tidak demokratis atau otoriter. Saudi Arabia diresmikan sebagai negara kerajaan Saudi Arabia oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1932. Sejak saat itu, rezim Al Saud menjadi penguasa di Saudi Arabia sampai sekarang. Dalam perjalanan terbentuknya negara Saudi Arabia sangat panjang.

³ Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2.

Raja Saudi merupakan pengambil keputusan yang utama, raja mewakili semua kepentingan masyarakatnya, baik kepentingan didalam negeri maupun kepentingan-kepentingan diluar negeri. Peranan Raja Saudi sangat dominan yang diperlihatkan oleh posisinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ketua komisi perencanaan pembangunan nasional, ketua majelis al syura, dan panglima tertinggi angkatan perang.⁴ Raja Saudi diganti secara turun temurun oleh keturunan al Saud lainnya.

Menurut kebiasaan dan konvensi politik yang berlaku dilingkungan kerajaan Saudi Arabia, penggantian kekuasaan Raja Saudi dilakukan setelah wafat, dan umumnya raja pengganti berdasarkan senioritas. Putera mahkota dalam hal ini berkedudukan sebagai calon pengganti raja. Dalam penetapan pangeran pengganti raja setelah wafat agak samar. Karna dalam ketetaneegaraannya penggantian itu belum ada dalam pengaturan secara akurat melihat bahwa pangeran Saudi Arabia sangat banyak sangkin banyaknya sampai sekitar 4.000 (empat ribu) bahkan lebih.⁵

Seperti yang dijelaskan di atas pergantian kekuasaan pemerintahan dilakukan setelah wafatnya raja dan dalam pemilihannya dilakukankan oleh raja sebelum wafat dan itu belum diatur dalam suatu peraturan yang membahas pengganti raja secara benar karna melihat peranan raja sangat besar dalam menentukan suatu kebijakan. Dalam sistem kerajaan Saudi Arabia tidak disebutkan siapa dan dari keturunan

⁴ Lihat “*Government and administration*” dalam The Kingdom of Saudi Arabia, terbitan resmi pemerintah Arab Saudi, 1996.

⁵ *Ibid.* 1996

yang mana yang akan menggantikan posisi raja jikalau raja wafat dan belum memilih penggantinya. Di al-Qur'an sendiri hanya menjelaskan kriteria-kriteria seorang pemimpin dan wajib mematuhiya. Maka dari itu disini penulis tertarik untuk mengkaji pergantian sistem ketatanegaraan Saudi Arabia dalam konteks pergantian perspektif siyasah dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pergantian kekuasaan dalam ketatanegaraan Saudi Arabia ?
2. Bagaimana implementasi siyasah dusturiyah dalam suksesi kekuasaan di Saudi Arabia ?
3. Bagaimana Komparasi suksesi kekuasaan Saudi Arabia dengan negara-negara muslim dan beberapa negara monarki yang ada di dunia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan Saudi Arabia dalam konteks pergantian kekuasaan.
- b. Mengetahui bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan Saudi Arabia.

- c. Melihat pandangan teori siyasah dusturiyyah terhadap pergantian kekuasaan dalam ketatanegaraan Saudi Arabia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil yang nantinya didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan atau referensi untuk membahas ketatanegaraan Saudi Arabia. Serta menjadi bahan bacaan bagi masyarakat maupun akademisi dalam memperluas pandangan terhadap pergantian kekuasaan dalam ketatanegaraan Saudi Arabia Perspektif siyasah dusturiyyah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian lain, maka perlu dilakukan telaah pustaka, dengan mencari karya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Sehingga terlihat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi oleh Arif Pamungkas “KERAJAAN SAUDI ARABIA (Deskriptif Historis Tentang Pergulatan Sosial-Politik (1902-1932))” skripsi ini membahas tentang sejarah atau historis berdirinya

kerajaan Saudi Arabia mulai dari masa belum terbentuknya kerajaan sampai terbentuk dan di pimpin oleh Raja Abdullaziz.

Kedua, Skripsi Oleh Muhamad Nashir “PERAN GERAKAN WAHHABI TERHADAP KERAJAAN SAUDI ARABIA PADA TAHUN 1744-1932 M” skripsi ini membahas tentang peran Wahhabi yang dimulai oleh Abdullah Khallab dalam menyebarkan ajaran Wahabi bermazhab Hambali untuk kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Peranan Wahhabi terbilang cukup besar dalam terbentuknya negara Saudi Arabia. Skripsi ini menganalisis menggunakan kajian historis.

Ketiga, Jurnal Oleh Panji Haryadi “PERAN MUHAMMAD BIN SALMAN TERHADAP PERUBAHAN PILAR KENEGARAAN ARAB SAUDI” jurnal ini membahas tentang masalah naiknya Mbs sebagai putra mahkota Arab Saudi telah membawa sangat banyak perubahan dalam lingkungan keluarga Saud. Meskipun masih berstatus sebagai putra mahkota pada faktanya dia sudah memimpin Arab Saudi bagaikan raja. Dari empat pilar ini Arab Saudi: keluarga Saud, Ulama Wahhabi, Minyak, dan relasi dengan AS, Mbs telah merombaknya, dari empat itu, hanya satu yang ia pertahankan, yakni relasi dengan AS.

Keempat, skripsi oleh Asrin Dimas Trifathullah yang berjudul “PERANAN ARAB SAUDI SEBAGAI AKTOR UTAMA DI TIMUR TENGAH”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa peranan Arab Saudi di Timur Tengah didasari oleh negaranya yang memiliki pemerintahan yang stabil di dukung oleh kekuatan nasionalnya. Wujud peranan Arab Saudi di Timur Tengah meliputi bantuan untuk menjaga stabilitas politik melalui bantuan ekonomi.

Kelima, Jurnal Oleh Suryo Ediyono “REFORMASI SISTEM KEBUDAYAAN DI ARAB SAUDI MASA PEMERINTAHAN RAJA ABDULLAH (2005-2015)”. Jurnal ini membahas tentang membolehkan perempuan masuk kedalam rana politik, dan menguarakan hak suara mereka dalam memilih pemimpin kota di Arab Saudi untuk pertama kali. Dalam jurnal ini juga membahas bagaimana pengaruh sistem pemerintahan yang dilakukan Raja Abdullah dalam menentukan kebijakan.

E. Kerangka Teori

Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan yang ada pada ilmu siyasah dusturiyah tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yaitu al-Qur’an dan Hadist.

Allah SWT berfirman:

ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون⁶

Negara dikenal dengan istilah ilmu kenegaraan, hukum tata negara, ilmu politik, dan ilmu administrasi negara. Jika kita melihat karya atau kitab para sarjana Islam. Maka jelas bahwa siyasah oleh para sarjana Islam sangat mirip dengan politik dalam arti luas. Menurut ilmu fiqh “dustur” adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintaham negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturannya dan adatnya.

⁶ Al-qur’an, Surat Yunus, Ayat 16.

Allah SWT berfirman:

قَوِّمِ لِيْ اِيْ يٰمُؤْتٰى اِيْ يٰلِىَّ
 تَشْرِىْحًا لِّبَعْضِ اَيِّ
 مَوْسُوْعٍ قَدِيْمٍ - 7

Abu A'la Al-Maududi memberikan defenisi bahwa “*Dustur*” adalah suatu dokumen yang semua memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dengan demikian , siyasah dusturiyah adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang pengaturan perundang-undangan yang oleh ihwal kenegaraan dari persuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ رِجْلًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيُبْلُوَكُمْ فِيْ مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - 9

Perubahan kemungkinan telah banyak yang disebabkan oleh kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah , “fatwa berubah karena perubahan waktu tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafaur al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun perbedaan gaya. Ini sesuai pula dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kepentingan rakyat”.

⁷ Al-qur'an Surat Ali Imran, Ayat 26.

⁸ H.A Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.*, (Bandung: Prenada Media Group, 2003), hlm. 1.

⁹ Al-qur'an Surat Al-An'am ayat 165.

Allah SWT berfirman:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹⁰

Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, ini sangat membantu kita dalam memahami siyasah dusturiyah dan prinsipnya. Terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadist.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹¹

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang diperlukan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁰ Al-qur'an Surat Ali Imran atar 159.

¹¹ Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 59.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Deskriptif- analisis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian memperdeskripsikan, mengkalsifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena menyangkut dengan undang-undang ataupun aturan-aturan lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami ketatanegaran Saudi Arabia dalam konteks pergantian kekuasaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data sangatlah penting dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan terdiri dari situs-situs lembaga maupun instansi, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literature, kitab, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah :

- 1) al-Qur'an, hadist dan buku-buku yang membahas ketatanegaran Saudi Arabia.

2) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dimana secara literature yang relevan dengan obyek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka akan dimulai mengklasifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data-data yang bersifat umum tersebut, dapat disimpulkan menjadi data-data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian, yaitu pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yang mempunyai maksud apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yaitu menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkenaan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kelima, kerangka

teori yang berisi pola berpikir kerangka berpikir dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Keenam, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk memberi gambaran awal penelitian.

Bab dua, berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siyasah dusturiyah dan ayat-ayat didalam al-Qu'an.

Bab tiga menjelaskan gambaran umum dan membahas tentang Pergantian Kekuasaan Dalam Ketatanegaraan Saudi Arabia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab keempat yaitu menganalisis data yang diperoleh oleh penulis terkait permasalahan yang diteliti. Yaitu Pergantian Kekuasaan Dalam Ketatanegaraan Saudi Arabia.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pergantian kekuasaan di Saudi Arabia dilakukan secara turun-temurun dari garis generasi pendiri kerajaan yaitu Raja Abdullaziz kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai sekarang. Pergantian raja biasanya dilakukan setelah raja wafat dan akan digantikan oleh putra mahkota yang sudah di pilih oleh dewan kepatuhan (*Allegiance Council*) yang terdiri dari 34 orang anak dan cucu abdullaziz. Setelah dipilih oleh dewan kepatuhan (*Allegiance Council*) melalui musyawarah dan voting maka akan ditunjuk siapa putra mahkota, wakil putra pertama, dan wakil putra mahkota kedua. Setelah wafatnya raja maka putra mahkota akan di bai'at sebagaimana tercantum dalam pasal 5 e.

Saudi Arabia secara jelas menegaskan bahwa Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai konstitusi dan pedoman bernegara. Didalam al-Qur'an dan hadist menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan msuyawarah dalam memutuskan sesuatu. Hal inilah yang di lakukan dalam pergantian kekuasaan di Saudi Arabia pengganti raja akan dimusyawarahkan oleh anggota kerajaan yang beranggotakan 34 siapa yang akan menjadi putra mahkota. Sejalan dengan siayasah dusturiyah bahwa Ahl al-Hall Wa al-Aqd mencakup hal-hal dalam musyawarah dengan dibentuknya suatu lembaga yang di dalamnya melakukan msuyawarah sebelum menentukan sesuatu demi kemaslahatan ummat.

Pergantian kekuasaan di beberapa negara di timur tengah seperti Mesir dan syiria dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat dikarenakan banyak negara-negara Islam yang berada di sana sudah beralih ke sistem sosialis demokrasi. Sedangkan ada beberapa negara seperti Yordania masih menggunakan sistem kerajaan atau monarki yang mana hampir sama dengan Saudi Arabia dalam pergantian kekuasaan yaitu secara turun temurun dari keturunan raja. Berbeda hal dengan beberapa negara negara kerajaan yang ada didunia yang masih menggunakan sistem kerajaan atau monarki yang mana dalam pergantian kekuasaan dari keturunan raja atau ratu seperti Jepang, Belanda dan Inggris. Tapi dalam urusan pemerintah di pegang penuh oleh perdana menteri.

B. Saran

Ketatanegaraan Saudi Arabia ini sangat bagus untuk jadikan bahan kajian dan penelitian. Karna pada dasarnya penulis sangat sedikit kesulihatn untuk mencari bahan penelitian terhadap objek ketatanegaraan Saudi Arabia yang masih sedikit dikaji secara ilmiah. Penelitian penulis yang berjudul sistem ketatanegaraan Saudi Arabia dalam konteks pergantian kekuasaan semoga dapat membantu para penulis lainnya untuk dijadikan salah satu sumber penelitian dan bahan bacaan.

Oleh karenanya, penulis berharap kepada teman-teman mahasiswa dan para akademisi terkhusus kepada para teman-teman prodi Hukum Tata Negara supaya agar melakukan penelitian terhadap

ketatanegaraan Saudi Arabia. Karna penulis merasa ketatanegaraan Saudi Arabia sangat bagus untuk dikaji.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

HADITS

An-Nizham al-Asasi lil Hukmi

Buku

- Abdul, Ahmad, Aal ath-Thahtawi, *The Great Leaders Kisah Khulafaur Rasyidin*, Jakarta : Gema Insani, 2009.
- Adan, Hasanuddin Yusuf, *Elemen-Elemen Politik Islam*, Yogyakarta : AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006.
- Aim dan Sukmadi Trisna, Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Grafindo, 2011.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Amirudin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazur Rahman*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Ash-shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Quranul Madjid An-Nur Jilid 2*. Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bogor : Kencana, 2003.
- Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Badri, Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekkah dan Madinah) 1800-1925*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Darul Ilmi, Tim, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta : Qultum Media, 2010.

- Fachruddin, Fuad Mohd, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1986.
- Fahrurrazi Aziz dan Mahyudin Erta, *Fiqh Manajerial Aplikasi Nilai-nilai Ibadah di Dalam Kehidupan*, Jakarta : Pustaka Al-Mawardi, 2010.
- H.A, Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung : Prenada Media Group, 2003.
- Halim, Abd, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKIS, 2013
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, Jakarta Selatan : Gaya Media Pratama, 2007
- Katsir, Ibnu, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsie Jilid I*, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Sadi Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Maggalatung, A. Salman, dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Ilmu Negara*, Bandung : Fajar Media, 2013
- Mukri Aji, Ahmad, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusd*, Bogor : Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Muhammad, Rusdji Ali, *Politik Islam*, Yogyakarta : Penerbit BDI Pt. Arun, BDI PIM, dan Yasat Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Mu"iz Ruslan, Utsman Abdul, *Pendidikan Politik Ihkwanul Muslimin*, Diterjemahkan oleh Jasiman, Hawin Murtadho, Salafuddin, Solo : Era Intermedia, 2000.
- Noer, Deliar, *Islam dan Politik*, Jakarta : Yayasan Risalah, 2003.
- Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H., *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Raja Grafindo Presada, 1994.

- Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2012.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Salus, Ali Ahmad, *Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'ī* Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta : GOZIAN Press, 2013
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi zhailil Quran Jilid 1*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Haryadi, Panji “*Peran Muhammad bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi*,” Jurnal ICMES Volume 2, No. 1 (Juni 2018)
- Nashir, Muhammad “*PERAN GERAKAN WAHHABI TERHADAP KERAJAAN SAUDI ARABIA PADA TAHUN 1744-1932 M*” Skripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2009.
- Pamungkas, Arif “*KERAJAAN SAUDI ARABIA (Deskriptif Historis Tentang Pergulatan Sosial-Politik (1902-1932 M))*” Skripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2009.

INTERNET

“Arab Saudi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi, akses 6 Juni 2019

“Bendera Arab Saudi”, https://id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Arab_Saudi, akses 8 November 2018

Berita Satu “Bagaimana Proses Penunjukan Raja Arab Saudi”, <https://www.beritasatu.com/dunia/462250/bagaimana-proses-penunjukan-raja-arab>, akses 7 November 2017

“Kingdom of Saudi Arabia”, <http://www.operationworld.org/country/saudi/owtext.html>, akses pada tahun 2019

Penulis adalah peneliti sekaligus mahasiswa s3 di jurusan teknik elektro King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia “Sekilas Sejarah Arab Saudi dan Raja-Rajanya”, <https://ukhuwahIslamiah.com/sekilas-sejarah-arab-saudi-dan-raja-rajanya/>, akses 26 Februari 2017





LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran Terjemahan A-Qur'an

Hal	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
7	6	Q.S. Yunus ayat 16	kemudian kami jadikan kalian pengganti-pengganti (mereka) dimuka bumi sesudah mereka, agar kami memperhatikan bagaimana kalian berlaku.
8	7	QS. Ali Imran ayat 26	Katakanlah : Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
8	9	QS. Al-An'am ayat 165	Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian dari kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang Dia berikan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
9	10	QS. Ali Imran ayat 159	Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah.

			Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwawal kepada-Nya.
63	64	QS. An Nisa ayat 105	Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-qur`an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KONSTITUSI ARAB SAUDI

Dasar Hukum

Pasal 1

Prinsip Umum:

Kerajaan Arab Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat.

Agama resmi Agama: Islam

Konstitusi: The Holy Qur'an dan Sunnah Nabi (tradisi)

Bahasa: Arab Resmi atau bahasa nasional

Modal: Modal Riyadh Nasional

Pasal 2

Libur nasionalnya:

- Idul Fitri (pesta agama dirayakan pada tanggal 1 Syawal, 10 orang bulan kalender Islam)
- Idul Ad-ha (pesta agama dirayakan pada tanggal 10 Dzul-Hijjah, yang Bulan ke-12 dalam kalender Islam)
- Kalender: Hijira (Lunar)
- Bendera Nasional

Pasal 3

Bendera nasional:

- Berwarna hijau
- Lebar sama dengan dua pertiga dari panjang
- Pasal iman (diterjemahkan sebagai "Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah"), tertulis di tengah dengan pedang terhunus di bawah.
- Tuhan atau dewa lainnya
- Moto Nasional
- lagu Nasional

Pasal 4

Lambang Negara terdiri dari dua pedang berpotongan dengan datepalm di atas

ruang antara mereka. Kedua lagu kebangsaan dan dekorasi diberikan oleh

Negara harus ditentukan oleh hukum.

Bagian 2: Sistem Pemerintahan

Pasal 5

Sistem pemerintahan di Arab Saudi harus monarki.

- Tipe pemerintah dibayangkan Dinasti hak harus dibatasi untuk anak-anak dari Pendiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud (Ibn Saud), dan anak-anak putra. Yang paling memenuhi syarat di antara mereka akan diundang, melalui proses "bai'ah", untuk memerintah disesuaikan dengan Kitab Allah dan Sunnah Nabi.
- Nama / struktur eksekutif (s)
- Kepala seleksi negara
- Kelayakan untuk kepala negara
- a. Raja nama Putra Mahkota dan mungkin membebaskannya dari tugas-tugasnya oleh Kerajaan Memesan.
 - Kepala seleksi negara
 - Kepala negara
- b. Putra Mahkota akan mencurahkan waktu penuh ke kantornya dan untuk setiap tugas lain yang dapat diberikan kepadanya oleh Raja.
- c. Putra Mahkota akan menganggap kekuasaan raja pada kematian yang terakhir sambil menunggu hasil dari "bai'ah".
 - Kepala pengganti negara
 - Kepala panjang jangka negara
 - Tuhan atau dewa lainnya

Pasal 6

Warga negara membaiaat Raja atas dasar Kitab Allah dan Nabi Sunnah, serta pada prinsip "pendengaran mematuhi" baik dalam kemakmuran dan kesulitan, dalam situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.

- Status hukum agama

Pasal 7

Rezim berasal daya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menguasai ini dan semua Hukum Negara lainnya.

- Jaminan Umum kesetaraan

Pasal 8

- Status hukum agama
Sistem pemerintahan di Kerajaan Arab Saudi didirikan pada dasar keadilan, "Syura" dan kesetaraan sesuai dengan syariat Islam (hukum mengungkap Islam).

Bagian 3: Pendukung dari Saudi Masyarakat

- Tuhan atau dewa lainnya

Pasal 9

Keluarga adalah inti dari masyarakat Saudi. Anggotanya harus dibesarkan dijiwai dengan Creed Islam yang menyerukan ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang bangsa yang dibebankan dengan otoritas; untuk menghormati dan penegakan hukum dan ketertiban; dan cinta tanah air dan rasa bangga dalam sejarah mulia.

Pasal 10

Negara harus mengambil berusaha keras untuk memperkuat ikatan yang memegang keluarga bersama-sama dan untuk melestarikan nilai-nilai Arab dan Islam-nya. Demikian juga tertarik untuk mengambil perawatan yang baik dari semua anggota keluarga dan menciptakan kondisi yang tepat untuk membantu mereka menumbuhkan keterampilan dan kemampuan mereka.

Pasal 11

Masyarakat Saudi akan berpegang teguh pada Rope Ilahi. Warganya akan bekerja sama untuk mendorong kebajikan, ketakwaan dan saling membantu; dan menghindari pertikaian.

Pasal 12

Negara harus mendorong persatuan nasional dan menghalangi semua yang dapat menyebabkan perpecahan, kerusakan dan pembagian.

Pasal 13

Pendidikan bertujuan penanaman akidah Islam di generasi muda dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga mereka

dapat menjadi berguna anggota masyarakat yang mencintai tanah air mereka dan bangga dalam nya history.

Bagian 4: Prinsip Ekonomi

- Perlindungan lingkungan

Pasal 14

- Kepemilikan sumber daya alam
Semua sumber yang diberikan Tuhan dari negara, baik di bawah dan di atas tanah, atau diperairan teritorial, atau dalam batas darat dan maritim yang Negara yurisdiksi meluas, serta pendapatan yang diperoleh darinya harus dimiliki oleh Negara sebagaimana ditentukan oleh hukum. Demikian juga hukum harus menentukan cara untuk menjadi digunakan untuk pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan sumber daya ini dalam cara kondusif untuk promosi Negara bunga, keamanan dan ekonomi.

Pasal 15

Tidak ada konsesi akan diberikan atau izin diberikan untuk pemanfaatan sumber daya alam negara, kecuali sebagaimana diizinkan oleh hukum.

Pasal 16

Milik umum adalah sakral. Itu harus dilindungi oleh Negara dan dipelihara oleh baik warga negara dan penduduk asing.

Pasal 17

- Hak untuk bekerja
Kepemilikan, modal dan tenaga kerja adalah dasar-dasar Kerajaan ekonomi dan kehidupan sosial. Mereka adalah hak pribadi yang melayani fungsi sosial sesuai dengan Syariah Islam.
- Perlindungan dari pengambilalihan

Pasal 18

- Hak untuk memiliki property
Negara harus menjamin kebebasan dan tidak dapat diganggu gugat milik pribadi. Pribadi properti harus tidak diambil alih kecuali untuk kepentingan umum dan confiscatee yang cukup kompensasi.
- Perlindungan dari pengambilalihan

Pasal 19

Penyitaan kolektif sifat dilarang. Penyitaan swasta sifat hanya akan dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 20

Pajak dan biaya dikenakan hanya atas dasar keadilan dan ketika kebutuhan timbul. Mereka hanya akan dikenakan, diubah, dihapus atau dikirimkan sesuai dengan hukum.

Pasal 21

Zakat (zakat) akan dipungut dan dibagikan kepada penerima manfaat yang sah.

Pasal 22

Pembangunan ekonomi dan sosial harus dicapai sesuai dengan metodis dan adil.

Bagian 5: Hak dan Kewajiban

Pasal 23

Negara harus melindungi Creed Islam dan harus memenuhi penerapan Syari'at.

- Status hukum agama
Negara harus memerintahkan yang baik dan melarang yang jahat, dan harus melakukan tugas panggilan Islam.

Pasal 24

Negara harus memelihara dan melayani Dua Masjid Suci. Ini akan memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang memanggil di Dua Masjid Suci supaya mereka dapat mengunjungi atau melakukan ziarah dan "Umrah" (ziarah minor) kenyamanan

dan kemudahan.

- Kelompok Regional

Pasal 25

Negara harus tertarik untuk mewujudkan aspirasi negara-negara Muslim Arab dengan

Berkenaan dengan solidaritas dan kesatuan sekaligus meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang ramah.

- Status hukum agama

Pasal 26

Negara harus melindungi hak asasi manusia sesuai dengan syariat Islam.

- dukungan Negara

Pasal 27

dukungan

- Negara tua bagi penyandang cacat
- Jaminan Umum jaminan sosial

Negara harus menjamin hak warga negara dan keluarga mereka dalam keadaan darurat dari dalam kasus penyakit, cacat dan usia tua. Demikian itu akan mendukung sosial sistem keamanan dan mendorong individu dan lembaga untuk berkontribusi pengejaran amal.

- Hak untuk bekerja

Pasal 28

Negara harus memberikan kesempatan kerja bagi semua orang berbadan sehat dan akan memberlakukan

undang-undang untuk melindungi karyawan dan majikan.

- Referensi seni

Pasal 29

- Hak untuk budaya
- Referensi untuk ilmu pengetahuan

Negara harus mendorong ilmu, seni dan budaya. Ini akan mendorong ilmiah penelitian, akan melestarikan warisan Arab

dan Islam dan akan berkontribusi Arab, Islam dan manusia peradaban.

Pasal 30

Negara harus memberikan pendidikan publik dan harus berkomitmen untuk pemberantasan kebutuhurufan.

- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Pasal 31

Negara harus solicitous untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dan wajib memberikan medis peduli

- Perlindungan lingkungan

Pasal 32

Negara harus berusaha untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan lingkungan dan mencegah polusi.

Pasal 33

Negara harus membangun dan melengkapi angkatan bersenjata untuk membela agama Islam, Dua Masjid Suci, masyarakat dan tanah air.

- Tugas untuk melayani militer

Pasal 34

Membela agama Islam, masyarakat dan tanah air akan menjadi tugas masing-masing dan setiap warga negara. Aturan militer harus dibilang oleh hukum.

Pasal 35

Aturan yang mengatur kewarganegaraan Arab Saudi harus ditetapkan oleh hukum.

- Perlindungan dari pengekangan dibenarkan

Pasal 36

Negara harus menjamin keamanan semua warga negara dan ekspatriat yang tinggal di dalam nya

domain. Tidak ada individu akan ditahan, dipenjarakan atau telah tindakannya dibatasi kecuali berdasarkan ketentuan hukum.

- Peraturan pengumpulan bukti

Pasal 37

- Hak untuk privasi
Rumah-rumah diganggu gugat. Mereka tidak akan masuk tanpa izin dari mereka pemilik, dan mereka tidak akan dicari kecuali dalam kasus yang ditentukan oleh hukum.
- Prinsip ada hukuman tanpa hukum

Pasal 38

Hukuman harus dibatasi untuk pelaku yang sebenarnya. Ada kejahatan harus ditetapkan sebagai hukuman tersebut dan tidak ada dikenakan kecuali di bawah ketentuan hukum atau undang-undang. Tidak ada hukuman dikenakan kecuali untuk tindakan yang terjadi setelah enactment dari ketentuan hukum yang mengatur mereka.

- Martabat manusia

Pasal 39

Media massa, fasilitas publikasi dan cara lain ekspresi akan berfungsi dalam cara yang sopan dan adil dan harus mematuhi undang-undang Negara. Mereka akan memainkan mereka bagian dalam mendidik massa dan meningkatkan persatuan nasional. Semua itu dapat menimbulkan kenakalan dan perselisihan, atau dapat membahayakan keamanan negara dan publik gambar, atau mungkin menyinggung terhadap martabat manusia dan hak-hak harus dilarang. Relevan peraturan akan menjelaskan bagaimana hal ini harus dilakukan.

- Hak untuk privasi

Pasal 40

- Telekomunikasi
Semua bentuk korespondensi, apakah disampaikan oleh telegraf, pos atau lainnya sarana komunikasi dianggap sakral. Mereka mungkin tidak disita, tertunda atau membaca, dan telepon tidak dapat disadap

Pasal 41

Warga asing di Kerajaan Arab Saudi harus mematuhi peraturan dan harus menghormati Saudi tradisi sosial, nilai-nilai dan perasaan.

- Perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan

Pasal 42

Prosedur

- Ekstradisi
- Hukum internasional
Negara harus memberikan suaka politik, jika demikian yang dibutuhkan oleh kepentingan umum. Hukum dan perjanjian internasional harus menetapkan prosedur dan aturan untuk ekstradisi penjahat biasa.
- tubuh Penasihat kepala negara

Pasal 43

- Hak petisi
The "Majlis" Raja dan "Majlis" dari Putra Mahkota harus terbuka untuk semua warga dan untuk siapa saja yang mungkin memiliki keluhan atau pengaduan. Setiap individu berhak untuk berkomunikasi dengan otoritas publik mengenai topik apapun dia mungkin ingin mendiskusikan.

Bagian 6: Kekuasaan Negara

Pasal 44

Kekuasaan Negara terdiri dari:

- The Kekuasaan Kehakiman
- The Executive Daya
- Kekuatan Organisasi

Semua kekuasaan ini harus bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang ini dan peraturan lainnya. Raja adalah sumber utama dari semua otoritas tersebut.

Pasal 45

Sumber Ifta (penguasa agama) di Kerajaan Arab Saudi adalah Al-Qur'an dan Nabi Sunnah. Hukum harus menentukan komposisi Ulama Senior

Papan dan Administrasi Penelitian Agama dan Ifta dan yurisdiksi nya.

- Yudisial kemerdekaan

Pasal 46

Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka. Dalam menjalankan tugasnya, para hakim tunduk pada otoritas selain itu Syari'at Islam.

Pasal 47

Kedua warga negara dan penduduk asing memiliki hak yang sama untuk litigasi. Yang diperlukan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

- Status hukum agama

Pasal 48

Pengadilan akan berlaku ketentuan syariat Islam untuk kasus dibawa ke hadapan mereka, menurut ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Negara sesuai ketat dengan Suci Al-Qur'an dan Nabi Sunnah.

Pasal 49

Tunduk pada ketentuan Pasal 53 undang-undang ini, pengadilan memiliki yurisdiksi untuk berurusan dengan semua jenis perselisihan dan kejahatan.

Pasal 50

Raja, atau siapapun dia mungkin mewakili, harus berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

- Pembentukan dewan peradilan

Pasal 51

- Struktur pengadilan
Hukum menetapkan pembentukan dewan peradilan tertinggi dan fungsinya sebagai serta organisasi dan yurisdiksi pengadilan.
- pilihan Mahkamah Agung

Pasal 52

- Pembentukan dewan peradilan
- Agung / Pengadilan biasa penghapusan hakim
- pengadilan biasa Hakim pilihan diangkat dan layanan mereka diakhiri oleh Royal Orde di atas usulan dewan peradilan tertinggi yang ditetapkan oleh hukum.
- Struktur pengadilan

Pasal 53

Hukum mendefinisikan struktur dan yurisdiksi Pengadilan Keluhan.

Pasal 54

Hukum harus menentukan referensi, organisasi dan yurisdiksi Dewan Investigasi dan Kejaksaan.

Pasal 55

Raja akan melakukan untuk memerintah sesuai dengan aturan Islam dan melakukan pengawasan penerapan syariah, peraturan, dan kebijakan umum Negara serta perlindungan dan pertahanan negara.

- Pembentukan kabinet / menteri

Pasal 56

- Powers kabinet
- Kelayakan untuk kabinet
- Nama / struktur eksekutif Raja akan menjadi Perdana Menteri dan dibantu dalam kinerjanya tugas oleh anggota Dewan Menteri sesuai dengan putusan hukum ini dan undang-undang lainnya. Dewan Menteri Hukum harus menentukan Powers Dewan dengan Berkenaan dengan urusan internal dan eksternal, mengatur badan-badan pemerintah dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Demikian juga UU harus menetapkan kondisi dimana Menteri harus memenuhi, kelayakan mereka, metode akuntabilitas mereka bersama dengan semua hal-hal lain yang berhubungan dengan mereka. Dewan hukum dan yurisdiksi wajib Menteri dimodifikasi dengan Undang-undang ini.
- penghapusan Kabinet

Pasal 57

Sebuah. Raja menunjuk Wakil Perdana Menteri dan Kabinet Menteri dan mungkin membebaskan mereka dari tugas mereka dengan perintah Royal.

- Pilihan Kabinet
- Wakil eksekutif
- a. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kabinet bertanggung jawab bersama-sama sebelum Raja untuk aplikasi syariat Islam, hukum dan Negara umum policy.
- b. Raja berhak untuk membubarkan dan membentuk kembali Dewan Menteri.

Pasal 58

Raja menunjuk menteri, wakil menteri dan pejabat dari "sangat baik grade "kategori dan ia dapat memberhentikan mereka dengan perintah Kerajaan sesuai dengan aturan hukum.

Menteri dan kepala otoritas independen bertanggung jawab sebelum Perdana Menteri kementerian dan otoritas mereka.

- penghapusan Kabinet

Pasal 59

Hukum harus menentukan ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, termasuk gaji, bonus, kompensasi, hak dan pensiun pensiun.

- Penunjukan Panglima

Pasal 60

- Pemilihan komandan aktif-tugas
Raja akan menjadi Panglima Tertinggi angkatan bersenjata dan akan menunjuk perwira militer dan menghentikan layanan mereka sesuai dengan hukum.
- ketentuan Darurat

Pasal 61

- Power untuk mendeklarasikan / menyetujui perang
Raja berhak untuk menyatakan keadaan darurat dan umum mobilisasi serta perang.
- ketentuan Darurat

Pasal 62

Jika bahaya mengancam keselamatan Kerajaan, integritas wilayahnya, keamanan rakyatnya dan kepentingan mereka, atau menghambat kinerja Negara lembaga, Raja harus mengambil tindakan yang diperlukan dan cepat untuk menghadapi ini bahaya. Jika Raja merasa bahwa langkah-langkah ini mungkin lebih baik permanen, ia kemudian akan mengambil apa pun tindakan hukum yang dianggap perlu dalam hal ini.

- hubungan luar negeri perwakilan

Pasal 63

Raja menerima Kings dan kepala negara, menunjuk perwakilan untuk lainnya negara dan menerima akreditasi dari perwakilan negara-negara lain untuk Kerajaan.

Pasal 64

Raja medali penghargaan dengan cara yang sama seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 65

Raja dapat mendelegasikan bagian dari kewenangannya untuk Putra Mahkota dengan perintah Royal.

- Wakil eksekutif

Pasal 66

Dalam hal itu bepergian ke luar negeri, Raja menerbitkan Royal Orde mewakili para Putra Mahkota untuk menjalankan urusan negara dan menjaga kepentingan rakyat seperti yang dinyatakan di Royal Order.

Pasal 67

Bertindak dalam jangka acuannya, Power Organisasi harus menyusun peraturan dan oleh-hukum untuk melindungi kepentingan publik atau menghilangkan korupsi di urusan Negara sesuai dengan aturan dari syariat Islam. Ini akan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan hukum ini dan dua undang-undang lain dari Dewan Menteri dan Majelis Al-Syura (Dewan Konsultatif).

- Pemberhentian legislative

Pasal 68

Majlis Al-Syura harus dibentuk. Hukumnya wajib menentukan struktur yang pembentukan, metode dengan yang latihan kekuatan khusus dan pemilihan anggotanya. Raja berhak untuk membubarkan Majlis Al-Syura dan kembali membentuknya.

Pasal 69

Raja dapat menghubungi Dewan Menteri dan Majlis Al-Syura untuk mengadakan patungan pertemuan yang ia dapat mengundang siapapun dia ingin untuk diskusi apapun masalah dia mungkin ingin meningkatkan.

- Kepala kekuasaan keputusan negara

Pasal 70

- Perjanjian ratifikasi Hukum, perjanjian, perjanjian internasional dan konsesi diterbitkan dan dimodifikasi oleh Kerajaan Keputusan.

Pasal 71

Hukum harus diterbitkan dalam lembaran resmi dan mereka mulai berlaku dari tanggal publikasi mereka kecuali tanggal lain ditetapkan.

Bagian 7: Urusan Keuangan

Pasal 72

Sebuah. Hukum harus menentukan pengelolaan pendapatan Negara, dan prosedur pengiriman mereka ke Kas Negara.

b. Pendapatan harus diperhitungkan dan dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada hukum.

- tagihan Anggaran

Pasal 73

- Kepala kekuasaan keputusan Negara
Tidak ada kewajiban harus dilakukan untuk membayar dana dari Kas Negara kecuali dalam sesuai dengan ketentuan anggaran. Haruskah ketentuan anggaran tidak cukup untuk membayar dana tersebut, Royal SK dikeluarkan untuk pembayaran mereka.

Pasal 74

Milik negara tidak dapat dijual, disewakan atau dibuang kecuali dalam Sesuai dengan law.

Pasal 75

Peraturan harus menetapkan ketentuan yang mengatur pembayaran yang sah dan bank, serta sebagai standar, langkah-langkah dan bobot.

- tagihan Anggaran

Pasal 76

- Kepala kekuasaan keputusan Negara Hukum harus menentukan tahun fiskal Negara. Anggaran akan diterbitkan oleh Royal Keputusan yang akan menguraikan estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk tahun ini. Itu anggaran harus dikeluarkan setidaknya satu bulan sebelum awal tahun fiskal. Jika, karena alasan kuat, anggaran tidak dikeluarkan pada waktu dan baru fiskal tahun belum memulai, validitas anggaran tua akan diperpanjang sampai baru anggaran telah dikeluarkan.

Pasal 77

Otoritas yang bersangkutan harus menyiapkan rekening akhir Negara untuk kadaluarsa tahun fiskal dan akan menyampaikannya kepada Perdana Menteri.

Pasal 78

Anggaran dan rekening akhir dari otoritas perusahaan harus tunduk sama ketentuan diterapkan pada anggaran Negara dan rekening akhir.

Bagian 8: Pengendalian dan Audit Otoritas

Pasal 79

Semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikendalikan, sehingga akan tetap dan cair (mobile) aset yang akan diperiksa untuk memastikan bahwa mereka benar dimanfaatkan dan dipelihara. Laporan atasnya tahunan disampaikan kepada Dewan Menteri. Hukum harus nama kontrol dan audit otoritas yang bersangkutan, dan harus menetapkan ketentuan yang berlaku dan akuntabilitas.

Pasal 80

Badan pemerintah harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa mereka melakukan baik dan menerapkan hukum dengan benar. Pelanggaran keuangan dan administrasi akan diselidiki dan laporan tahunan di atasnya disampaikan kepada Dewan Menteri. Hukum harus nama kewenangan untuk dikenakan dengan tugas ini dan akan mendefinisikan akuntabilitas dan kerangka acuan.

Bagian 9: Ketentuan Umum

- Hukum internasional

Pasal 81

- Organisasi-organisasi internasional
- Status hukum perjanjian
Pelaksanaan hukum ini tidak akan melanggar perjanjian dan kesepakatan yang Kerajaan telah ditandatangani dengan negara-negara lain atau dengan organisasi internasional dan lembaga

Pasal 82

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 7 Undang-undang ini, tidak ada ketentuan undang-undang ini akan, dengan cara apapun, terhalang kecuali itu adalah tindakan sementara yang diambil selama waktu perang atau dalam keadaan darurat sebagaimana ditentukan oleh hukum.

- prosedur amandemen UUD

Pasal 83

Tidak ada amandemen undang-undang ini harus dilakukan kecuali dengan cara yang sama di mana ia memiliki telah diterbitkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[فهرس المحتويات]

6	النظام الأساسي للحكم
6	الباب الأول
6	- المبادئ العامة -
6	المادة الأولى (1) :
6	المادة الثانية (2) :
6	المادة الثالثة (3) :
6	المادة الرابعة (4) :
6	الباب الثاني
6	- نظام الحكم -
6	المادة الخامسة (5) :
7	المادة السادسة (6) :
7	المادة السابعة (7) :
7	المادة الثامنة (8) :
7	الباب الثالث
7	- مقومات المجتمع السعودي -
7	المادة التاسعة (9) :
7	المادة العاشرة (10) :
7	المادة الحادية عشرة (11) :
7	المادة الثانية عشرة (12) :
7	المادة الثالثة عشرة (13) :
7	الباب الرابع
8	- المبادئ الاقتصادية -
8	المادة الرابعة عشرة (14) :
8	المادة الخامسة عشرة (15) :
8	المادة السادسة عشرة (16) :
8	المادة السابعة عشرة (17) :
8	المادة الثامنة عشرة (18) :
8	المادة التاسعة عشرة (19) :
8	المادة العشرون (20) :
8	المادة الحادية والعشرون (21) :
8	المادة الثانية والعشرون (22) :
8	الباب الخامس
9	- الحقوق والواجبات -

9	: المادة الثالثة والعشرون (23)
9	: المادة الرابعة والعشرون (24)
9	: المادة الخامسة والعشرون (25)
9	: المادة السادسة والعشرون (26)
9	: المادة السابعة والعشرون (27)
9	: المادة الثامنة والعشرون (28)
9	: المادة التاسعة والعشرون (29)
9	: المادة الثلاثون (30)
9	: المادة الحادية والثلاثون (31)
10	: المادة الثانية والثلاثون (32)
10	: المادة الثالثة والثلاثون (33)
10	: المادة الرابعة والثلاثون (34)
10	: المادة الخامسة والثلاثون (35)
10	: المادة السادسة والثلاثون (36)
10	: المادة السابعة والثلاثون (37)
10	: المادة الثامنة والثلاثون (38)
10	: المادة التاسعة والثلاثون (39)
10	: المادة الأربعون (40)
11	: المادة الحادية والأربعون (41)
11	: المادة الثانية والأربعون (42)
11	: المادة الثالثة والأربعون (43)
11	الباب السادس
11	- سلطات الدولة -
11	: المادة الرابعة والأربعون (44)
11	: المادة الخامسة والأربعون (45)
11	: المادة السادسة والأربعون (46)
11	: المادة السابعة والأربعون (47)
11	: المادة الثامنة والأربعون (48)
12	: المادة التاسعة والأربعون (49)
12	: المادة الخمسون (50)
12	: المادة الحادية والخمسون (51)
12	: المادة الثانية والخمسون (52)
12	: المادة الثالثة والخمسون (53)
12	: المادة الرابعة والخمسون (54)

12	المادة الخامسة والخمسون (55) :
12	المادة السادسة والخمسون (56) :
13	المادة السابعة والخمسون (57) :
13	المادة الثامنة والخمسون (58) :
13	المادة التاسعة والخمسون (59) :
13	المادة الستون (60) :
13	المادة الحادية والستون (61) :
13	المادة الثانية والستون (62) :
13	المادة الثالثة والستون (63) :
13	المادة الرابعة والستون (64) :
13	المادة الخامسة والستون (65) :
14	المادة السادسة والستون (66) :
14	المادة السابعة والستون (67) :
14	المادة الثامنة والستون (68) :
14	المادة التاسعة والستون (69) :
14	المادة السبعون (70) :
14	المادة الحادية والسبعون (71) :
14	الباب السابع
14	- الشؤون المالية -
14	المادة الثانية والسبعون (72) :
14	المادة الثالثة والسبعون (73) :
15	المادة الرابعة والسبعون (74) :
15	المادة الخامسة والسبعون (75) :
15	المادة السادسة والسبعون (76) :
15	المادة السابعة والسبعون (77) :
15	المادة الثامنة والسبعون (78) :
15	الباب الثامن
15	- أجهزة الرقابة -
15	المادة التاسعة والسبعون (79) :
15	المادة الثمانون (80) :
16	الباب التاسع
16	- أحكام عامة -
16	المادة الحادية والثمانون (81) :
16	المادة الثانية والثمانون (82) :

16 : المادة الثالثة والثمانون (83)

17 الوثائق ذات الصلة



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الرقم: أ / 90
التاريخ: 1412/8/27هـ

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

أمرنا بما هو آت:

- أولاً - إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
- ثانياً - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
- ثالثاً - يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ،

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

النظام الأساسي للحكم

المادة الأولى

- المبادئ العامة -

المادة الأولى (1) :

المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية (2) :

عيدا الدولة، هما عيد الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة (3) :

يكون على الدولة كما يلي:

- 1- لونه أخضر.
- 2- عرضه يساوي ثلثي طوله.
- 3- تتوسطه كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً. ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة (4) :

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

المادة الثانية

- نظام الحكم -

المادة الخامسة (5) :

- 1- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
- 2- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصالح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- 3- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
- 4- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
- 5- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة السادسة (6) :

يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة (7) :

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة (8) :

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث

– مقومات المجتمع السعودي –

المادة التاسعة (9) :

الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به بتاريخه المجيد.

المادة العاشرة (10) :

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة (11) :

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة (12) :

تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة (13) :

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

الباب الرابع

- المبادئ الاقتصادية -

المادة الرابعة عشرة (14) :

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الخامسة عشرة (15) :

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المادة السادسة عشرة (16) :

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السابعة عشرة (17) :

الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشرة (18) :

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعرض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة (19) :

تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة العشرون (20) :

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة الحادية والعشرون (21) :

تُجبي الزكاة وتُتفق في مصارفها الشرعية

المادة الثانية والعشرون (22) :

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس

- الحقوق والواجبات -

المادة الثالثة والعشرون (23) :

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الرابعة والعشرون (24) :

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكن من أداء الحج والعمرة والزياره بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون (25) :

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون (26) :

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والعشرون (27) :

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرضى، والعجز، والشيوخ، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون (28) :

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون (29) :

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون (30) :

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون (31) :

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون (32) :

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون (33) :

تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون (34) :

الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون (35) :

يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون (36) :

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون (37) :

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون (38) :

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون (39) :

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تنقيف الأمة ودعم وحدتها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون (40) :

المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصنونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون (41) :

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون (42) :

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون (43) :

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.

الباب السادس

- سلطات الدولة -

المادة الرابعة والأربعون (44) :

تتكون السلطات في الدولة من:

- السلطة القضائية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون (45) :

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة السادسة والأربعون (46) :

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون (47) :

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون (48) :

تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة التاسعة والأربعون (49) :

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة الخمسون (50) :

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة الحادية والخمسون (51) :

يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة الثانية والخمسون (52) :

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.

المادة الثالثة والخمسون (53) :

يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الرابعة والخمسون (54) :

يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون (55) :

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السادسة والخمسون (56) :

الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون (57) :

- 1- يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
- 2- يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
- 3- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون (58) :

يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون (59) :

يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.

المادة الستون (60) :

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُهي خدماتهم، وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون (61) :

يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.

المادة الثانية والستون (62) :

للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبيها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلائم نظاماً.

المادة الثالثة والستون (63) :

يستقبل الملك، ملوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الرابعة والستون (64) :

يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الخامسة والستون (65) :

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون (66) :

يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.

المادة السابعة والستون (67) :

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة الثامنة والستون (68) :

يُنشأ مجلس للشورى، ويُنين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة التاسعة والستون (69) :

للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة السبعون (70) :

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الحادية والسبعون (71) :

تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.

الباب السابع

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

الشؤون المالية

المادة الثانية والسبعون (72) :

أ- يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزنة العامة للدولة.

ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة الثالثة والسبعون (73) :

لا يجوز الائتزام بدفع مال من الخزنة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون (74) :

لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموافقة.

المادة الخامسة والسبعون (75) :

تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازن.

المادة السادسة والسبعون (76) :

يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورهما وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون (77) :

تُعَد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون (78) :

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن

- أجهزة الرقابة -

المادة التاسعة والسبعون (79) :

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.

المادة الثمانون (80) :

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.

الباب التاسع

- أحكام عامة -

المادة الحادية والثمانون (81) :

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون (82) :

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ، وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون (83) :

لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



الوثائق ذات الصلة



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

XXXVI

الرقم: م / 23
التاريخ: 1412/8/26هـ

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38
وتاريخ 1377/10/22هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1412/8/26هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً - إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام
مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 1377/10/22هـ

لا تشمل الأنظمة التالية:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 114 وتاريخ 1412/8/26هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر:

إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 1377/10/22هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama : Budi Harianto
Tempat, Tanggal lahir : Kampung Jawa, 05 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Kampung Jawa, Rantau Prapat, Sumatera Utara
Alamat di Yogyakarta : Pedaak Baru, RT. 17/RW.05, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY
Email : budiharianto.678@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1. Tk Misbahul Dziki Pulo Padang Rantau Prapat
2. SD Gunung Raya 112145 (Lulus Tahun 2009)
3. MTS Misbahul Dziki Pulo Padang (Lulus Tahun 2012)
4. MAN Rantau Prapat (Lulus Tahun 2015)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Budi Harianto